



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 15
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 3 April 2023
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Evaluasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan tata ruang di Kawasan IKN
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 38 (tiga puluh delapan) dari 50 (lima puluh) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dengan agenda evaluasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan tata ruang di Kawasan IKN, pada hari Senin, 3 April 2023, dibuka pukul 10.28 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dengan agenda evaluasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan tata ruang di Kawasan IKN, sebagai berikut:

1. Pelapasan Kawasan Hutan:

- Menteri LHK telah menetapkan SK Pelepasan Kawasan Hutan SK.1354/MENLHK/SETJEN/P LA.2/12/2022, Kawasan Hutan yang dilepaskan seluas 36.150,03 ha.
- Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap kawasan hutan, dengan hasil: Masih ada penguasaan lahan di areal pelepasan kawasan hutan, atas lahan yang belum *clear and clean* akan dilakukan penyelesaian oleh KLHK sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tindak lanjut:

- Akan dilakukan serah terima areal pelepasan Kawasan hutan dari MenLHK kepada MenKeu dan dari Menkeu kepada Kepala OIKN, dengan BAST
- Akan dilakukan pencatatan BMN dan ADP terhadap areal pelepasan kaw hutan
- Akan diproses Pengajuan Hak Pengelolaan dari Kepala OIKN kepada Menteri ATR/BPN, dilaksanakan secara terpadu dengan para pihak.

2. Pengadaan Tanah:

- Pengadaan Tanah di KIPP 1A: Tim Pembebasan Lahan (Kementerian PUPR, ATR, Pemprov Kaltim dan OIKN) sudah memproses pengadaan lahan sebanyak 330 Bidang, 18 Bidang sudah dibayar, 312 Bidang sedang diproses.
- Pengadaan Tanah di KIPP 1B dan 1C: Perencanaan oleh Kementerian PUPR dan persiapan oleh Tim Pembebasan Lahan yang melibatkan Pemerintah Provinsi Kaltim. Jumlah Bidang yang akan dibebaskan 128 Bidang.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dengan agenda evaluasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan tata ruang di Kawasan IKN, sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemenuhan lahan Ibu Kota Nusantara melalui pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah, Komisi II DPR RI meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mempercepat proses pengadaan lahan tersebut dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan agar kegiatan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada tahun 2024.

2. Terkait dengan penyusunan rencana detail tata ruang wilayah, Komisi II DPR RI meminta kepada OIKN agar melakukan pelibatan publik secara luas dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, kegiatan pertambangan, pencemaran pesisir dan laut, agar kedepan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif, mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan, serta melindungi kehidupan masyarakat di wilayah IKN, termasuk jika ada wilayah adat, sebagai implikasi pembangunan infrastruktur IKN.
3. Komisi II DPR RI mendorong Kepala OIKN untuk segera melakukan percepatan penyelesaian proses legislasi 6 (enam) peraturan perundang-undangan terkait tata ruang dan pertanahan.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.25 WIB.

Jakarta, 3 April 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270